

Konstruksi Media Dalam Memberitakan Politisi Perempuan Yang Terlibat Korupsi (Analisis Framing Kritis Pemberitaan Harian Umum Kompas Terhadap Kasus Korupsi Angelina Sondakh)

Oleh : Dila Novita

Abstract

This research discusses how Kompas Daily's reported on the case of Angelina Sondakh's corruption. This study is a qualitative research with critical framing analysis, adoption of the Radical Feminism theory by Kate Millet. The primary data techniques collected by Kompas news text and the secondary data techniques collected by in-depth interviews. The result of the study found the fact that views of Kompas news on Angelina Sondakh's corruption case is not solid and comprehensive. It puts Angie just as the actor of corruption, not as the victim of the patriarchal culture that took place in the political parties, the content of the gender bias as many as accentuate the feminine side of a woman.

Keywords: Media Framing; Woman in Politics, Radical Feminism, Patriarchy, Gender Bias

I.1. Pendahuluan

Aliran pemikiran feminisme merupakan suatu generalisasi dari berbagai sistem gagasan mengenai kehidupan sosial dan pengalaman manusia yang dikembangkan berdasarkan perspektif perempuan, penekanan teori ini bisa dilihat dalam tiga hal. *Pertama*, sasaran studi penelitian bertolak pada situasi dan pengalaman perempuan dalam masyarakat. *Kedua*, dalam proses penelitian perempuan dijadikan sentral. *Ketiga*, teori feminis dikembangkan oleh pemikir kritis dan para aktivis demi kepentingan perempuan yang berusaha mewujudkan kehidupan lebih baik bagi perempuan (Ritzer, 2003: 404).

Littlejohn menyatakan bahwa aliran feminisme meliputi berbagai pemikiran dan yang paling menonjol dalam komunikasi salah satunya adalah aliran feminisme radikal (Littlejohn, 2002: 222-223). Menurut pandangan feminisme radikal gerakan untuk mensejajarkan partisipasi politik perempuan tidak hanya dilakukan dengan memberikan

jaminan pada hak politik melalui undang-undang (sebagaimana pemikiran feminisme liberal), tetapi perlu juga dilakukan gerakan untuk mendorong kesadaran masyarakat dari belenggu nilai-nilai patriarki seperti yang menjadi penekanan dalam feminisme radikal.

Salah satu perjuangan kaum feminis dalam partisipasi politik adalah dengan memberikan jaminan terhadap hak politik perempuan melalui *affirmative action* (tindakan khusus sementara). Melalui Undang-undang No. 12 Tahun 2003, setiap partai politik diminta untuk memenuhi ketentuan kuota 30% dalam Daftar Caleg Sementara yang diajukan ke Komisi Pemilihan Umum. Tindakan ini merupakan langkah awal untuk menghapuskan ketidakseimbangan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

Dalam pandangan feminis radikal Kate Millett (Tong, 1998: 73), termarjinalnya perempuan dalam bidang politik berakar pada operasi perempuan yang menyatu dalam sistem patriarki. Diperkuat oleh pendapat Chasteen (dalam Ritzer, 2003: 433), sebagai upaya untuk membebaskan perempuan dari belenggu laki-laki di berbagai bidang, harus dimulai dengan memfungsikan kembali kesadaran mendasar perempuan sehingga setiap perempuan mengakui nilai dan kekuatan dirinya sendiri; menolak tekanan patriarki yang melihat diri perempuan lemah, tergantung, dan kelas kedua (*second class*), dan bekerja dalam kesatuan dengan perempuan lain, dengan menggalang semangat persaudaraan untuk saling percaya dan saling membela.

Selain perjuangan melalui pengadaan payung hukum dalam bentuk Undang-undang dan perjuangan untuk melakukan rekonstruksi ulang budaya patriarki yang selama ini dominan menguasai cara pandang masyarakat Indonesia, upaya lain yang bisa dilakukan oleh sesama aktivis perjuangan gender (baik laki-laki maupun perempuan), adalah dengan membangun relasi aktif dengan institusi media yang saat ini masih berfungsi sebagai pilar keempat demokrasi, maka menjadi keniscayaan untuk melibatkan media secara aktif dalam menyuarakan aspirasi dan kepentingan kaum perempuan di segala bidang, termasuk bidang politik dan pemerintahan.

Shoemaker dan Reese melihat bahwa isi media dilatarbelakangi sebuah ide besar, yaitu ideologi yang mempengaruhi ekstramedia, organisasi, rutinitas media dan sisi individual pekerja media (Chesney, 1998:23). Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor-faktor tersebut mempengaruhi sebuah media dalam menyajikan berita. Sebagai contoh, demokrasi mampu menumbuhkan gagasan penguatan gender bagi masyarakat, dan media sebagai pilar keempat demokrasi bisa juga melakukan perannya dalam penguatan kesadaran gender, sehingga keduanya bisa saling berkaitan.

Penggambaran perempuan dalam media massa selama ini menunjukkan bahwa kaum perempuan masih mengalami ketertindasan secara sistematis yang dilakukan oleh

lingkungannya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Frye (dalam Richardson dan Taylor, 1993: 8) bahwa penindasan terhadap kaum perempuan dilakukan oleh sebuah jaringan kekuasaan dalam berbagai bentuk (Sunarto: 2000: 4-5). Hardjana (dalam Ibrahim dan Suranto, 1998: 94) menyatakan bahwa media massa lebih cenderung memperlakukannya daripada menyatakan solidaritas kepada perempuan, karena media massa hidup dalam budaya pria yang paternalistik. Ditambahkan oleh Ibrahim (Ibrahim dan Suranto, 1998: 108), gambaran perempuan dalam media massa masih cenderung sebagai objek, karena yang mendominasi media, baik dari segi pemilik, penulis, reporter, editor adalah laki-laki. Selama hal tersebut masih berlangsung, maka perempuan tidak bisa melakukan banyak hal atau menuntut beragam kehendak yang berkaitan dengan perubahan citra kaumnya di media massa. Dikuatkan oleh pendapat Yatim (1992: 6; 1998: 5), media massa di Indonesia dikuasai oleh budaya patriarki dan kapitalisme dengan dominasi kaum pria di dalamnya (Sunarto, 2000: 5-7).

Pasca reformasi 1998 dilanjutkan dengan Pemilu demokratis tahun 1999, yang kemudian diikuti dengan kehadiran Megawati sebagai figur pemimpin politik perempuan di Indonesia, maka semakin menguatkan gagasan tentang peran perempuan di ranah politik. Pada kenyataannya saat ini perempuan semakin percaya diri untuk tampil di dunia politik, masuk sebagai anggota atau pengurus partai politik, maupun organisasi sosial kemasyarakatan.

Persoalan muncul ketika sosok perempuan yang masuk ke dunia politik, kemudian terjebak dalam kasus korupsi. Sebelumnya diasumsikan perempuan bersih dari korupsi dan diharapkan kehadiran kaum perempuan dalam politik bisa membersihkan kesan bahwa dunia politik memang rentan terjadi praktek-praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Jika dilihat ke belakang, sebenarnya tidak sedikit kaum laki-laki yang menjadi tersangka kasus korupsi bahkan sudah terbukti secara hukum bersalah. Namun, ketika tampilan berita di media secara intens mengulas dan membahas perempuan yang terjerat dan menjadi tersangka korupsi seolah memberikan kesan bahwa perempuan tidak berbeda dengan laki-laki ketika sudah menjadi seorang politisi, bahkan lebih buruk lagi, pemberitaan media semakin menyudutkan perempuan yang menjadi tersangka korupsi. *Tagline* pemberitaan media pun seringkali sangat bias gender, yaitu mensejajarkan perempuan dengan korupsi, seperti salah satu judul artikel opini dari Ani Soetjipto di Harian Umum Kompas yang ditampilkan adalah “Perempuan dan Korupsi” (Kompas, Senin, 22 Oktober 2012), selama ini tidak pernah ada judul berita atau artikel serupa tentang koruptor laki-laki, seperti “Laki-laki dan Korupsi”.

Tentu saja hal ini tidak adil dan sangat merugikan kaum perempuan. Perempuan yang awam dengan dunia politik, semakin apriori dan apatis untuk memasuki dunia ini. Oleh karena itu, keseimbangan informasi sudah semestinya di junjung oleh media. Korban ketidakadilan dalam pemberitaan tersebut misalnya terjadi pada kasus Angelina Sondakh, salah seorang mantan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat. Meskipun faktanya terdapat perilaku politik yang tidak konsisten dari politisi perempuan ini, misalnya pada saat kampanye pemilu DPR RI tahun 2009, ia merepresentasikan diri sebagai generasi muda yang menolak korupsi dan tayangan itu ditampilkan hampir di semua media selama kampanye berlangsung. Tindakan ini sebagai pencitraan diri dan pencitraan partai yang mengusungnya. Sesuatu yang sangat ironis kemudian, Angie nama sapaannya, ditetapkan sebagai tersangka sejak 3 Februari 2012. Angie dijerat dengan pasal 5 ayat 2, atau pasal 11 atau pasal 12 huruf a UU 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) secara resmi menahan mantan Putri Indonesia 2001 tersebut pada hari Jumat, (27 April 2012) sesuai menjalani pemeriksaan perdananya sebagai tersangka kasus korupsi Wisma Atlet dan Kemendiknas.

Namun, ada hal yang patut diperhatikan juga adalah tidak semuanya politisi perempuan terlibat dalam kasus korupsi. Hal itu sesuai dengan pernyataan Nurul Arifin anggota DPR RI periode 2009-2014 dari Fraksi Golkar agar jangan mengeneralisasi politisi perempuan secara keseluruhan, jika ada oknum perempuan di DPR yang terlibat kasus korupsi. Melalui tabel berikut ini, terlihat bahwa secara kuantitas, politisi DPR yang terlibat korupsi, dalam status sebagai tersangka dan terpidana dan bahkan sudah memperoleh putusan tetap dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, lebih banyak politisi laki-laki dibandingkn politisi perempuan.

Tabel 1.1

Pengurus Partai Politik Yang Terjerat Korupsi

Nama	Asal Partai	Jabatan di Partai	Korupsi	Status/Vonis
Anas Urbaningrum	Partai Demokrat	Ketua Umum	Korupsi Proyek Hambalang	Tersangka (22/2/2013)
Emir Moeis	PDI-P	Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan	Suap proyek PLTU Tarahan, Lampung, 2004	Tersangka (20/7/2012)
Murdoko	PDI-P	Ketua DPD Jawa Tengah	Korupsi dana kas Kab. Kendal 2003	2,5 tahun penjara (8/11/2012)
M. Nazaruddin	Partai Demokrat	Bendahara Umum	Wisma Atlet	4 tahun 10 bulan penjara (20/4/2012)
Angelina Sondakh	Partai Demokrat	Wakil Sekretaris Jenderal	Di Kemenpora dan Kemendiknas	4,5 tahun penjara (10/1/2013)
Zulkarnaen Djabar	Partai Golkar	Fungsionaris	Pengadaan Al Qur'an di Kementerian Agama	Tersangka (29/6/2012)
Wa Ode Nurhayati	PAN	Fungsionaris	Suap dana penyesuaian infrastruktur daerah	6 tahun penjara
Andi Alfian Malarangeng	Partai Demokrat	Anggota Dewan Pembina	Proyek Hambalang	Tersangka (7/12/2012)
Hartati Murdaya	Partai Demokrat	Anggota Dewan Pembina	Suap izin usaha perkebunan di Kab. Buol	2 tahun 8 bulan penjara
Luthfi Hasan Ishaq	PKS	Presiden Partai	Suap proyek impor daging sapi	Tersangka (5/2/2013)

Sumber: Litbang Kompas 2012-2013, diolah dari pemberitaan Kompas

Dalam pemberitaan Kompas, Kamis, 14 Maret 2013, halaman 1 yang berjudul “Korupsi di Politik Sistemik-Politisi Incar Sektor Strategis”, Kompas mengangkat bahwa kasus-kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan korupsi oleh anggota atau pengurus partai politik dilakukan secara sistemik, bersama-sama, dan dari hulu ke hilir. Para politisi itu pun mengincar sejumlah sektor strategis. Dalam sajian berita yang sama ditambahkan, bahwa menurut kajian Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan ada kelemahan pengaturan perundang-undangan dalam soal pendanaan partai politik yang menjadi salah satu penyebab maraknya korupsi oleh para politisi tersebut.

I.2 Permasalahan Penelitian

Peneliti tertarik untuk mengangkat judul dalam penelitian ini: “Konstruksi Media Dalam Memberitakan Politisi Perempuan yang Terlibat Korupsi (Analisis Framing Kritis

Pemberitaan Harian Umum Kompas Terhadap Kasus Korupsi Angelina Sondakh)”, dengan melakukan analisis framing secara kritis (menggunakan analisis framing Robert N. Entman) terhadap kasus korupsi yang menjerat politisi perempuan di DPR RI, dalam hal ini Angelina Sondakh.

I.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Framing Berita tentang Politisi Perempuan yang Terlibat Korupsi dalam Kasus Korupsi Angelina Sondakh di Harian Umum Kompas?
2. Apakah terdapat ideologi patriarki dalam konstruksi berita tentang Politisi Perempuan yang Terlibat Korupsi dalam Kasus Korupsi Angelina Sondakh di Harian Umum Kompas?

1.4 Signifikansi Penelitian

1.4.1 Signifikansi Akademik

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya mengenai politisi perempuan, fokusnya pada pemberitaan masa kampanye (ketika mereka belum menjadi anggota DPR RI). Sementara, penelitian tesis ini berfokus pada bagaimana pembingkai berita di Harian Umum Kompas tentang Politisi Perempuan (anggota DPR RI yang sudah terpilih pada periode 2009-2014) yang kemudian terlibat Korupsi, salah seorang politisi perempuan yang telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Tipikor (tindak pidana korupsi) dalam kasus korupsi adalah Angelina Sondakh dari Partai Demokrat.

Perbedaan lain dalam penelitian ini, menggunakan Teori Feminisme Radikal dalam menganalisis framing berita Harian Umum Kompas tentang Kasus Korupsi Angelina Sondakh. Peneliti memilih Feminisme Radikal, karena pemikiran ini bisa menjelaskan kenapa pemberitaan media tentang politisi perempuan yang lebih mengangkat sisi esensial (menonjolkan sisi-sisi feminim) seorang perempuan tersebut sebagai hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh media.

Secara akademis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah data tentang persoalan gender, politisi perempuan dan korupsi di Indonesia khususnya di media cetak. Selain itu, aplikasi paradigma kritis dan penggunaan analisis framing media tentang politisi perempuan yang terlibat korupsi merupakan sebuah pendekatan yang belum banyak diterapkan dalam mengkaji persoalan gender tersebut.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi masukan kepada Harian Umum Kompas untuk memberitakan tentang politisi perempuan khususnya yang terlibat korupsi berdasarkan perspektif yang lebih berkeadilan gender.

2. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teori Kritis. Teori komunikasi kritis sebagian besar berhubungan dengan media karena kekuatan media dalam menyebarkan ideologi yang dominan, serta bagaimana kekuatannya dalam mengungkapkan ideologi alternatif serta ideologi yang bertentangan (Littlejohn, 2008).

2.1 Teori Kritis

Menurut Dedy (2005) dalam paradigma teori-teori kritis, teori merupakan kritik untuk mengungkapkan 'true conditions' di balik suatu 'realitas semu' atau 'kesadaran palsu'

Theory is not a deductive system of interconnected axioms and laws, but a critique that reveals true conditions behind virtual reality, false consciousness and beliefs (Golding and Murdock, dalam Graham 1992: 15-32, lihat Dedy, 2005: 3).

Dalam penilaian Horkheimer (1993), teori kritis bisa dianggap mencukupi (*adequate*) jika memenuhi tiga kriteria berikut:

1. *Explanatory*, yaitu menjelaskan tentang apa yang salah dengan realitas sosial. Bisa juga dimaknai adanya muatan *judgments* dalam teori, mengenai apa yang salah dan benar, yang seharusnya dan tidak seharusnya, yang wajar dan tidak wajar.
2. *Practical*, mengidentifikasi aktor-aktor sosial yang bisa mengubah dan mengoreksi realitas sosial.
3. *Normative*, teori kritis harus menyajikan norma-norma yang jelas, baik yang digunakan sebagai dasar kritik terhadap sebuah realitas sosial, maupun tujuan-tujuan praktis yang bisa dicapai melalui transformasi sosial.

2.2 Pendekatan Feminisme Radikal

Dalam menganalisa keadaan perempuan digunakan alur berfikir yang disebut dengan Teori Feminisme Radikal (2004: 127 – 128) dengan tokohnya seperti Alison

Jaggar dan Paula Rothenberg yang mengatakan bahwa perempuan berada pada penindasan yang paling bawah.

Feminisme radikal didasarkan pada dua keyakinan utama: *Pertama*, bahwa perempuan memiliki nilai positif mutlak sebagai perempuan, suatu keyakinan yang ditegaskan untuk menentang apa yang mereka nyatakan sebagai devaluasi perempuan universal, dan *Kedua*, bahwa perempuan dimana-mana ditindas-dengan keras oleh sistem patriarki (Ritzer, 2003: 431-432). Struktur penindasan paling mendasar terdapat dalam sistem patriarki, yaitu penindasan laki-laki atas perempuan (Lerner dalam Ritzer, 2003: 431).

Peran tubuh dan seksualitas sangat penting dalam seluruh konsep feminisme radikal. Penindasan, menurut paham ini, semuanya berawal melalui dominasi atas seksual perempuan yang ditemui di ranah privat. Oleh karena itu, kaum feminis radikal mempunyai slogan yang ampuh untuk pergerakan mereka, yakni "*the personal is political*" (yang pribadi adalah politis). Ini artinya berbagai penindasan yang terjadi di ruang pribadi (ranah privat) merupakan juga penindasan yang berlangsung di ruang publik (Gadis Arivia, 2003: 101).

2.2.1 Pandangan Feminisme Radikal-Libertarian Kate Millet

Dalam penelitian ini, pemikiran feminis radikal yang peneliti jadikan acuan berasal dari pemikiran Kate Millet, yang dikenal sebagai feminis radikal-libertarian pertama yang bersikeras menyatakan bahwa akar opresi terhadap perempuan sudah terkubur dalam pada sistem seks/gender dalam ideologi patriarki. Dalam buku karyanya, *Sexual Politics* (1970), Millet berpendapat bahwa sex adalah politis, terutama karena hubungan laki-laki dan perempuan merupakan paradigma dari semua hubungan kekuasaan:

Kasta sosial mendahului semua bentuk inegalitarianisme: ras, politik, ekonomi, dan jika penerimaan terhadap supremasi laki-laki sebagai hak sejak lahir tidak dihilangkan, semua sistem opresi akan terus berlangsung hanya atas mandat logis dan emosional dalam situasi manusia yang primer (Kate Millet, 1970: 25, lihat Tong, 2010: 73).

Pilihan peneliti untuk menggunakan pendekatan feminisme radikal adalah karena pandangan feminisme ini lebih tepat dalam membedah terjadinya framing berita yang mengandung ideologi patriarki di media. Khususnya dalam framing berita tentang Angelina Sondakh. Meningkatnya keterwakilan perempuan di legislatif merupakan kelanjutan dari suksesnya perjuangan feminis dalam pandangan feminisme liberal, dimana perjuangan melalui penyediaan sistem dan perangkat hukum melalui Undang-undang yang

memperjuangkan *affirmative action* berhasil diputuskan melalui DPR sejak tahun 2003, maka dampak dari pemenuhan keterwakilan perempuan 30% di DPR tersebut perlu dilihat lebih lanjut, terutama pada kasus politisi perempuan di DPR yang kemudian terjebak pada perilaku korupsi. Bagaimana kasus politisi perempuan tersebut dibingkai dalam pemberitaan media, akan menggambarkan, ideologi apa yang terkandung dalam pemberitaan media tersebut.

Politisi perempuan yang terlibat dalam korupsi tidak bisa dilihat berdiri sendiri, ada kontribusi lingkungan politik di partai yang mempengaruhi perilaku tersebut akhirnya terjadi. Pada sisi inilah seharusnya Media melihat persoalan korupsi yang dilakukan politisi perempuan bisa lebih dalam. Bagi perempuan-perempuan yang berada dalam struktur strategis di sebuah kepengurusan partai politik, bukan tidak mungkin dalam proses untuk mencapainya dan ketika ia menjalaninya, masih mengalami opresi dari sistem patriarki yang berlaku di lingkungannya. Untuk bertahan dalam sistem dominan patriarki ini, perempuan dipaksa dan terpaksa harus beradaptasi dengan aturan main yang berlaku di lingkungannya, agar ia bisa “selamat”.

Sehingga dalam pandangan peneliti, di sini media tidak bisa hanya meletakkan kesalahan atas tindakan korupsi pada politisi perempuan itu sendirian dan hanya melihatnya dalam kaca mata tindakan pidana atau pelanggaran hukum semata, ada sistem yang mengopresi sehingga hal itu terjadi dan sistem politik yang masih didominasi oleh laki-laki, menyebabkan perempuan sebagai korban karena berada dalam posisi subordinat.

2.3 Studi Framing Media

Gagasan tentang framing pertama kali diperkenalkan oleh Betterson pada tahun 1955 (Sudibyo dalam Sobur, 2009: 161). Mulyana dalam Erianto (2002: xiv-xv) menjelaskan bahwa analisis framing sesuai digunakan dalam melihat konteks sosial budaya sebuah wacana, khususnya dalam melihat hubungan berita dan ideologi.

Framing pada dasarnya merupakan metode untuk melihat cara bercerita (*story telling*) media terhadap suatu peristiwa. Dimana cara bercerita tersebut kemudian terlihat pada “cara melihat” terhadap sebuah realitas yang dijadikan suatu berita (Eriyanto, 2002:10). Konsep framing sering digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media (Elizabeth, 1995: 371). Framing dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas

sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada isu yang lain (Bimo, Erianto, Frans, 1999: 20).

2.3.1 Analisis Framing

Analisis framing adalah analisis yang memusatkan perhatian pada bagaimana media mengemas dan membingkai berita. Proses itu umumnya dilakukan dengan memilih peristiwa tertentu untuk diberitakan dan menekankan aspek tertentu dari peristiwa lewat bantuan kata, aksentuasi kalimat, gambar, dan perangkat lainnya (Eriyanto, 2002: xxi). Bagaimana media memahami dan memaknai realitas, dan dengan cara apa realitas itu ditandakan, hal inilah yang menjadi pusat perhatian dari analisis framing.

Terdapat dua esensi utama dalam framing. *Pertama*, bagaimana peristiwa dimaknai, ini berkaitan dengan bagian mana yang diliput dan mana yang tidak diliput. *Kedua*, bagaimana fakta itu ditulis, berhubungan dengan pemakaian kata, kalimat, dan gambar untuk mendukung gagasan. Dalam pandangan Todd Gitlin (dalam Eriyanto, 2002: 79) framing merupakan sebuah strategi bagaimana realitas/dunia dibentuk dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada khalayak pembaca. Peristiwa-peristiwa ditampilkan dalam pemberitaan agar tampak menonjol dan menarik perhatian khalayak pembaca.

Frames are principles of selection, emphasis, and presentation composed of little tacit theories about what exists, what happens, and what matters (Todd Gitlin, 1980: 6).

Hubungan antara framing dan realitas lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hubungan Antara Framing dan Realitas

Pemberitaan tertentu	peristiwa	Kenapa peristiwa itu diberitakan? Kenapa peristiwa lain tidak diberitakan? Kenapa peristiwa yang sama di tempat/pihak yang berbeda tidak diberitakan?
Pendefinisian tertentu	realitas	Kenapa realitas didefinisikan seperti itu?
Penyajian sisi tertentu		Kenapa sisi tertentu yang ditonjolkan? Kenapa bukan sisi yang lain?
Pemilihan fakta tertentu		Kenapa fakta itu yang ditonjolkan? Kenapa bukan fakta yang lain?
Pemilihan tertentu	narasumber	Kenapa narasumber itu yang diwawancarai? Kenapa bukan yang lain?

Sumber: Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media, Eriyanto, 2002, hlm. 97-

2.3.2 Analisis Framing Robert N. Entman

Robert N. Entman merupakan salah seorang ahli yang meletakkan dasar-dasar bagi analisis framing dalam studi isi media. Entman (1993: 52) mendefinisikan framing sebagai seleksi dari berbagai aspek realitas yang diterima dan membuat peristiwa itu lebih menonjol dalam suatu teks komunikasi, dalam banyak hal, itu berarti menyajikan secara khusus definisi terhadap masalah, interpretasi sebab akibat, evaluasi moral, dan tawaran penyelesaian sebagaimana masalah tersebut digambarkan.

Entman (1993) melihat framing dalam dua dimensi besar: *pertama*, seleksi isu dan *kedua*, penekanan atau penonjolan aspek-aspek realitas/isu tertentu. Penonjolan merupakan proses membuat informasi menjadi lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat oleh khalayak. Realitas yang disajikan secara menonjol atau mencolok memiliki kemungkinan lebih besar untuk diperhatikan dan mempengaruhi khalayak dalam memahami suatu realitas. Secara lebih jelas, dua dimensi dalam melihat framing bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Melihat Dimensi Dalam Framing

Seleksi Isu	Aspek ini berkaitan dengan pemilihan fakta. Dari realitas yang kompleks dan beragam, ditentukan aspek mana yang diseleksi untuk ditampilkan. Ada bagian yang dimasukkan (<i>include</i>) dan ada bagian berita yang dikeluarkan (<i>exclude</i>). Tidak semua aspek atau bagian dari isu ditampilkan, wartawan memilih aspek tertentu dari sebuah isu.
Penonjolan Aspek	Aspek ini berkaitan dengan penulisan fakta. Setelah aspek tertentu dari isu tertentu dari suatu peristiwa/isu dipilih, kemudian ditentukan bagaimana aspek tersebut ditulis, berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar, dan citra tertentu untuk ditampilkan pada khalayak.

Sumber: Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media, Eriyanto, 2002 hlm. 222.

Dalam prakteknya, framing dijalankan oleh media dengan menyeleksi isu tertentu dan mengabaikan isu yang lain; dan menonjolkan aspek dari isu tersebut dengan menggunakan berbagai strategi wacana-penempatan yang mencolok (Bimo, Eriyanto, Frans, 1999: 21). Hal tersebut tentu saja bisa menyebabkan terjadinya dua realitas yaitu “realitas yang sesungguhnya” dan “realitas media”-yang terbentuk setelah tangan wartawan (James, Phillips & Graham Murdock, 1980). Apa yang dilaporkan oleh media seringkali merupakan hasil dari pandangan mereka (predisposisi perseptuil) wartawan ketika melihat dan meliput peristiwa. Analisis framing akan membantu untuk mengetahui

bagaimana realitas peristiwa yang sama itu dikemas secara berbeda oleh wartawan sehingga menghasilkan berita yang berbeda.

Menurut Eriyanto (2002: 223-224) pada dasarnya konsepsi framing Entman merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi di dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berfikir tertentu terhadap suatu peristiwa yang diwacanakan. Berikut ini terdapat empat pertanyaan yang melatarbelakangi konsepsi framing Entman:

Tabel 2.3
Pertanyaan dalam Framing Robert N. Entman

Pendefinisian Masalah (<i>define problems</i>)	Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah (<i>diagnose causes</i>)	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (<i>actor</i>) yang dianggap sebagai penyebab masalah?
Membuat Keputusan Moral (<i>make moral judgement</i>)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?
Menekankan Penyelesaian (<i>treatment recommendation</i>)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?

Sumber: Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media, 2002, hlm. 223-224.

2.4 Perspektif Perempuan dan Korupsi

Pemberitaan media massa (salah satunya Kompas) dalam beberapa tahun terakhir semarak dengan deretan tersangka korupsi yang berjenis kelamin perempuan. Mereka dikenal sebagai sosialita, figur publik, dan pemegang jabatan terhormat di institusi pengambilan keputusan di Indonesia. Fenomena tersebut kemudian memunculkan hujatan, kecaman, sekaligus mematahkan argumen dan teori yang pernah jadi referensi. Studi di Universitas Maryland (1999), Bank Dunia (1999), Transparency International (TI), Kenya (2001), Universitas Queensland (tanpa tahun), dan Ricol, Lasterie & Associate (2007) yang menyatakan bahwa perempuan membayar suap lebih jarang dan korupsi akan turun kalau lebih banyak perempuan terwakili di parlemen (Ani Soetjipto dalam Perempuan dan Korupsi, Kompas, Senin, 22 Oktober 2012).

Pada sisi lain, sebenarnya spektrum berbeda juga ditemukan dalam studi dan kajian yang menunjukkan temuan berbeda. Penelitian Universitas Sussex (tanpa tahun), Dewan Eropa (2004), TI (2007), dan GTZ (2004) menunjukkan pengaruh gender pada

korupsi tidak universal dan tidak ada hubungan kausalitas antara peningkatan partisipasi perempuan dan penurunan korupsi. Jika akses terhadap kekuasaan dibuka, belum tentu perempuan tidak korupsi dan tidak lebih korup (Kompas, 22 Oktober 2012).

Ani (2012: 2) menegaskan, agenda antikorupsi tidak relevan dikaitkan dengan agenda peningkatan representasi perempuan di arena politik. Peningkatan representasi perempuan menyangkut soal HAM (Hak Asasi Manusia) dan prinsip keadilan demokrasi. Perempuan penting hadir dalam institusi pengambil keputusan mewakili kategori kelompok yang jumlahnya sangat besar dengan pengalaman khas yang hanya bisa dipahami oleh sesama perempuan.

2.5 Asumsi Penelitian

Sesuai dengan beberapa teori yang digunakan, maka asumsi penelitian ini, yakni ingin melihat apakah ideologi patriarki ada dalam framing berita di Harian Umum Kompas. Pemberitaan media juga mempengaruhi bagaimana penekanan berita tentang politisi perempuan yang terlibat dalam kasus korupsi secara intensif atau berulang-ulang diangkat, terutama terhadap politisi perempuan Partai Demokrat, Angelina Sondakh. Bahkan dalam pemberitaan tentang Angie, terdapat beragam *angle* berita yang digunakan Kompas, agar setiap sajian berita tersebut menarik bagi pembaca.

Sehingga bisa dikatakan, media memberitakan Angie, karena ia perempuan, ia menonjolkan sifat-sifat femininnya, ia selebritis, ia *single parents* yang membesarkan ketiga anaknya, ia menarik secara fisik dan penampilan, ia cerdas dengan tingkat pendidikan tinggi (S2), memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dan ia berasal dari kelompok Partai yang berkuasa di Pemerintahan maupun Legislatif. Jadi sebenarnya, banyak ulasan tentang Angie karena “label” atau “embel-embel” yang melekat pada dirinya dibandingkan pemberitaan tentang substansi kasus korupsi itu sendiri.

Dalam pandangan peneliti, sampai saat ini, telah berlangsung ideologi patriarki dalam institusi media, khususnya Kompas, dalam beberapa pemberitaan mereka, yang kemudian tercermin dalam mengonstruksi suatu realitas sesuai dengan pandangan institusi media tersebut. Apa yang direkonstruksi merupakan bagian dari agenda media atas agenda publik, sebab media menonjolkan isu-isu tertentu untuk disuguhkan kepada khalayak. Sehingga, publik pun menganggap penting akan isu tersebut.

3. Metodologi Penelitian

3.1 Paradigma Penelitian

Dalam suatu penelitian sosial, paradigma memiliki posisi yang penting karena hal tersebut membantu peneliti untuk mengetahui beberapa hal, yakni cara atau teknik pengumpulan data, jenis data yang diperoleh, dan cara melaporkan data agar memenuhi *goodness* atau *quality criteria* paradigma masing-masing (Hamad, 2005: 2).

3.1.1 Paradigma Kritis

Penelitian ini menggunakan paradigma kritis (*critical paradigm*). Paradigma kritis memiliki beberapa unsur yang harus diperhatikan dan dijalankan oleh peneliti, diantaranya: epistemologi, ontologi, dan metodologi sebagaimana yang disampaikan oleh Egon G. Guba dan Yvonna S. Lincoln dalam Denzin (2000: 163-175), ditambahkan dengan pemaparan dari Littlejohn (2002: 29-30) tentang aksiologi.

3.1.2 Analisis Gender

Dalam pandangan Mansour Fakih (2001: 3-4), Konsep penting yang perlu dipahami dalam membahas persoalan perempuan adalah membedakan antara konsep seks (jenis kelamin biologis) dan konsep gender (jenis kelamin sosial). Pemahaman dan pembedaan terhadap kedua konsep tersebut sangat diperlukan dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa perempuan. Hal tersebut karena adanya kaitan erat antara perbedaan gender (*gender differences*) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) dengan struktur kehidupan masyarakat secara lebih luas. Melalui konsep ini, telah lahir suatu analisis gender.

Melalui framing berita Harian Umum Kompas tersebut perlu diketahui, apakah kemudian Angie mengalami perlakuan diskriminatif dengan banyaknya pemberitaan dirinya melebihi pemberitaan kasus korupsi rekan politisi laki-laki lainnya yang sedang menjalani proses hukum yang sama (korupsi), bagaimana *angle* berita yang diangkat oleh Kompas dalam kasus Angie, apakah kemudian terjadi eksploitasi terhadap sisi keperempuanan Angie yang sengaja diangkat secara berlebihan untuk menarik perhatian para pembaca Kompas dan pada akhirnya perlu diketahui, apakah Angie telah mengalami kekerasan secara psikologis, verbal, maupun fisik atas pemberitaan-pemberitaan tersebut.

Inilah yang perlu peneliti ketahui melalui penerapan analisis gender dalam menganalisis permasalahan penelitian ini, karena pada dasarnya sebagai manusia, Angie berhak mendapatkan pemberitaan yang seimbang dengan rekan laki-laki dia lainnya,

yang juga terkena kasus korupsi (seperti Anas Urbaningrum atau Nazaruddin), bukan hanya karena ia perempuan, kemudian terjadi *expose* besar-besaran terhadap pemberitaan dirinya, yang bahkan seringkali terlepas dari substansi persoalan hukum yang sedang ia alami.

3.2 Metode Penelitian Kualitatif

Penelitian kualitatif menekankan pentingnya memahami bagaimana orang menginterpretasikan berbagai kejadian di dalam kehidupan mereka. Dengan pola pikir induktif, peneliti menarik hal-hal khusus yang ia temui dalam setiap kejadian dimana ia sedang melakukan pengamatan ke dalam kesimpulan secara umum yang merujuk pada pola perilaku atau asumsi dari kejadian atau tindakan sosial yang dilakukan oleh subjek penelitian tersebut.

3.3 Sumber dan Teknik Perolehan Data

Pada penelitian ini, sumber data primer diperoleh melalui berita-berita yang dimuat di Harian Umum *Kompas*. Berita-berita tersebut terutama berita yang terkait dengan kasus Korupsi yang dialami oleh Angelina Sondakh. Sumber Data yang dianalisis dalam penelitian ini diawali dari judul berita Kompas Senin, 10 September 2012 tentang “Vonis Angie Bisa Ringan Ada Kelemahan pada Dakwaan Perkara Korupsi”. Sampai dengan pemberitaan Kompas Kamis tanggal 7 Februari 2013 dalam “Putusan Anggie Dilaporkan ke KY, MA Hadapkan Hakim dalam MKH”.

Peneliti tidak mengkhususkan pada salah satu jenis berita, tapi menampilkan jenis berita *hard news* maupun *soft news*. Bentuk lain dari berita seperti pojok tidak peneliti masukkan, dan ada penambahan dari kolom opini yang diisi oleh para pakar atau tokoh masyarakat yang memiliki pemikiran pada isu yang sama sebagai penambahan kekuatan dalam argumentasi penelitian ini, khususnya bagi tulisan yang memiliki perspektif yang sama dengan peneliti.

3.3.1 Teknik Perolehan Data

a. Analisis Teks Berita

Teknik perolehan data yang digunakan melalui studi pustaka atas teks-teks berita di Harian Umum Kompas. Selain itu, untuk memperkaya perspektif, peneliti juga menggunakan beberapa tesis, disertasi, dan jurnal lainnya yang mengungkapkan penelitian terkait dengan pemberitaan politisi perempuan di media massa sebelumnya.

b. Wawancara Mendalam (*in-depth interview*)

Selain teks sebagai sumber utama data, penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara mendalam sebagai data sekunder. Patton (2002:341) mengemukakan bahwa wawancara kualitatif bertujuan untuk mengetahui apa yang ada dalam pikiran orang lain, kemudian menyusun cerita mereka dan menjawab permasalahan yang berkaitan dengan penelitian.

Dalam penelitian ini, wawancara merupakan data sekunder, dan dilakukan dengan cara *indepth interview*, yakni wawancara mendalam atau biasa disebut dengan *semi-structured interview*. Hennick dan kawan-kawan menyebutnya metode yang urgen dalam memperoleh pengetahuan secara detail (Hennick *dkk*, 2011:109).

3.3.2 Teknik Perekrutan Informan

Populasi yang sesuai dengan permasalahan di atas, tidak lepas dari institusi media itu sendiri dalam mengonstruksi realitas yang ada terkait dengan politisi perempuan yang terlibat korupsi dan bagaimana tampilan Kompas dalam pemberitaan mereka, kemudian peneliti juga menganggap penting bagaimana pandangan akademisi/aktivis perempuan dan sekaligus juga aktivis anti korupsi tentang pemberitaan Kompas selama ini, Sehingga, peneliti menentukan populasi melalui dua unsur, yaitu :

1. Institusi Media Massa, yang berasal dari Kompas, jurnalis perempuan yang konsen terhadap politik dan pemberitaan perempuan di media.
2. Peneliti/Dosen/Aktivis Perempuan dan Anti Korupsi

Dari populasi subyek penelitian di atas, peneliti memilih dua informan, dimana dari masing-masing unsur dipilih satu orang yang dipandang mengerti dan menguasai permasalahan terkait dengan penelitian ini. Informan di atas diwawancarai dengan cara *in-depth interview*.

3.3.3 Strategi Perekrutan Narasumber

Dalam menentukan populasi pada penelitian ini, peneliti menggunakan strategi perekrutan *Gatekeepers* (Hennick *dkk*, 2011:92-96), yakni orang yang memiliki kapabilitas atau menonjol dalam kedua kelompok tersebut dan mengetahui bahkan ahli tentang topik yang berkaitan dengan penelitian ini, serta memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelompok tersebut.

Dalam penelitian ini, informan yang dianggap merepresentasikan permasalahan yang peneliti pilih, yakni *Pertama*, Institusi Media Massa, Jurnalis Harian Umum Kompas,

perempuan yang konsen terhadap persoalan politik dan pemberitaan perempuan di media massa, yaitu Maria Hartiningsih. *Kedua*, Ani Soetjipto, Pengajar FISIP UI yang sekaligus sebagai *Board Member Indonesian Corruption Watch dan Transparency Indonesia*. Kedua informan ini dipilih karena peneliti memandang, mereka mampu menggambarkan permasalahan yang menjadi pokok kajian penelitian ini, dan mampu menjawab asumsi atau bangunan *theoretical framework* yang disusun dalam penelitian.

3.3.4 Pemilihan Media

Penelitian ini menggunakan media cetak nasional Harian Umum Kompas karena HU ini memiliki sasaran pembaca masyarakat seluruh Indonesia, dengan prosentase pembaca di Jakarta 43,9%. Pembaca di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi 19,1%. Pembaca di wilayah Jawa Barat dan Banten 11,7%. Pembaca di Pulau Jawa secara keseluruhan (diluar Jakarta, Jawa Barat dan Banten) 13,1% dan sisanya di luar pulau Jawa 12,1%, dimana 74,2% pembaca Kompas berlangganan dan sisanya 24,8% membeli secara eceran (mediakit kompas, 2013).

Harian Kompas merupakan Media Cetak Nasional yang memiliki pembaca cukup banyak yakni pada waktu Weekday: 1.475.562 pembaca dan Weekend: 2.084.060 pembaca (Kompas Readers Survey, 2008). Sehingga, peneliti menggunakan harian Kompas sebagai unit analisis penelitian. Peneliti melakukan observasi terhadap Kompas dengan menggunakan *non-participant observation*, yang dilakukan tidak hanya sekali tetapi secara terus menerus sampai menemukan jawaban atas masalah yang ada dalam penelitian.

4. Analisis Hasil Penelitian

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Kompas pertama kali terbit di Jakarta tahun 1965 masih merupakan harian umum dengan tiras tertinggi di Indonesia. Kompas diterbitkan oleh Kelompok Kompas Gramedia (KKG), yang selain Grup Jawa Pos, merupakan perusahaan media terbesar di Indonesia. Harian ini selama masa kekuasaan diktator patuh pada pemerintah dan dianggap sebagai “New Order Newspaper par Excellence” (Hill, 1995: 84, Anett Keller, 2009: 45).

4.1.1 Profil Harian Umum Kompas

Kompas lahir tanggal 28 Juni 1965 dengan motto “Amanat Hati Nurani Rakyat”, dipasarkan mulai keesokan harinya 29 Juni 1965. Edisi pertama Kompas terbit dengan empat halaman. Tercatat dua orang perintis berdirinya Kompas, yaitu PK. Ojong (alm) dan

Jakob Oetama. Kompas ingin ikut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, menempatkan kemanusiaan sebagai nilai tertinggi, mengarahkan fokus perhatian dan tujuan pada nilai-nilai yang transenden atau mengatasi kepentingan kelompok dengan rumusan baku “Humanisme transcendenal”.

Profil pembaca 30% perempuan dan 70% laki-laki. Jumlah profesi pembaca Kompas terbesar berasal dari karyawan swasta sebesar 39% berdasarkan angket pembaca Kompas 2012. Dari segi jenis pendidikan 81% pembaca Kompas berpendidikan Diploma ke atas, dan dari segi usia 51% pembaca berusia antara 20%-39%. Dengan pengeluaran perbulan minimal Rp.2000.000,00 ke atas atau bisa disebut dalam kategori Sosial Ekonomi Menengah ke Atas (Profil Media, Mediakit Kompas 2013, hlm. 3-5).

4.2 Framing Kompas Terhadap Politisi Perempuan Yang Terlibat Korupsi

Peneliti mencoba menganalisis bagaimana sebenarnya framing berita Kompas tentang politisi perempuan yang terkena kasus korupsi, analisis framing tersebut dilakukan terhadap beberapa judul dan isi berita Kompas tentang Angelina Sondakh yang disajikan telah mengalami bias gender terkait identitas Angie sebagai salah satu politisi perempuan di DPR.

Dalam pandangan peneliti, tindakan korupsi baik yang dilakukan oleh politisi laki-laki maupun politisi perempuan adalah perilaku yang salah, karena tidak hanya melanggar hukum, tapi juga melanggar norma dan keadilan dalam masyarakat. Perilaku korupsi yang melibatkan politisi di DPR bisa dilihat dari pemberitaan Kompas tanggal 27 Februari 2012 di halaman 3, melalui tabel berikut:

Tabel 4.1
Korupsi Yang Melibatkan Sejumlah Anggota DPR

Nama	Dugaan Kasus	Keterangan
Saleh Djasit (Partai Golkar: 2004-2009)	Penyelewengan proyek pengadaan alat pemadam kebakaran di Provinsi Riau	Vonis 4 tahun penjara
Al Amin Nur Nasution (Partai Persatuan Pembangunan: 2004-2009)	Suap terkait pengalihan fungsi hutan lindung di Kabupaten Bintan	Vonis 8 tahun penjara
Abdul Hadi Djamal (Partai Amanat Nasional: 2004-2009)	Suap terkait proyek pembangunan bandara dan pelabuhan di kawasan timur Indonesia	Vonis 3 tahun penjara
Azwar Chesputra (Partai Golkar: 2004-2009) Hilman Indra (Partai	Korupsi alih fungsi hutan lindung Pantai Air Telang di Sumatera Selatan untuk Pelabuhan Tanjung Api-api	Masing-masing vonis 4 tahun

Nama	Dugaan Kasus	Keterangan
Bulan Bintang: 2004-2009) Fachri Andi Leluasa (Partai Golkar: 2004-2009)		
Endin J Soefihara (PPP: 1999-2004) Dudhie Makmun Murod (PDI-P: 1999-2004) Hamka Yandhu (Partai Golkar: 1999-2004)	Penerimaan cek perjalanan terkait pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia tahun 2004	Vonis 1 tahun 3 bulan penjara Vonis 2 tahun penjara Vonis 2,5 tahun penjara
M. Nazaruddin (Partai Demokrat: 2009-2014)	Menerima gratifikasi terkait proyek pembangunan wisma atlet di Palembang	Vonis 4 tahun 10 bulan penjara
Djufri (Partai Demokrat: 2009-2014)	Pengelembungan dana pembelian lahan sejumlah proyek di Kota Bukittinggi saat menjabat Walikota Bukittinggi	Vonis 4 tahun penjara
Amrun Daulay (Partai Demokrat: 2009-2014)	Korupsi pengadaan mesin jahit dan impor sapi di Kementerian Sosial	Vonis 1 tahun 5 bulan penjara
Angelina Sondakh (Partai Demokrat: 2009-2014)	Korupsi proyek wisma atlet di Palembang dan Korupsi pengadaan sarana dan prasarana perguruan tinggi di Kemendiknas	Vonis 4,5 tahun penjara

Sumber: Litbang Kompas, diolah dari pemberitaan Kompas

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa sebelum kasus korupsi yang didakwakan kepada Angelina Sondakh, sudah ada beberapa vonis pengadilan tindak pidana korupsi yang memutuskan bersalah dan menghukum beberapa mantan anggota DPR laki-laki dari periode 1999-2004, 2004-2009, dan 2009-2014 yang berasal dari partai lain, maupun dari partai yang sama dengan Angie Partai Demokrat, namun pemberitaan tentang mereka tidak segenar pemberitaan tentang kasus korupsi Angelina Sondakh.

Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya memfokuskan pada teks berita *hard news* tetapi juga *soft news*. Dari 62 jumlah berita tentang korupsi dan Angelina Sondakh, 29 berita mencantumkan nama Angelina Sondakh sebagai judul berita dan 33 sisanya tidak. Peneliti menemukan empat berita tentang Angelina Sondakh yang isinya menggambarkan bias gender. Keempat berita inilah kemudian yang peneliti analisis dengan menggunakan analisis framing Robert N. Entman untuk melihat framing berita Kompas tersebut.

Berikut ini adalah daftar keempat judul berita yang membahas tentang kasus korupsi Angelina Sondakh:

Tabel 4.2
Judul Teks Berita Kompas
Tentang Kasus Korupsi Angelina Sondakh

No.	Judul Teks Berita	Halaman	Hari dan Tanggal Terbit
1.	Angelina Sondakh Menyesal Masuk Politik	3	Sabtu, 15 Desember 2012
2.	Angelina Menangis Dituntut 12 Tahun karena Dinilai Giring Anggaran di Kemenpora	3	Jum'at, 21 Desember 2012
3.	Repotnya Sosialita Jika Jadi Terdakwa	3	Minggu, 23 Desember 2012
4.	Angie Merasa Lugu, Vonis akan Dijatuhkan Kamis 10 Januari 2013	4	Kamis, 4 Januari 2013

Sumber: Harian Umum Kompas, diolah oleh peneliti.

4.3 Analisis Framing Robert N. Entman tentang Kasus Korupsi Angelina Sondakh

Melalui empat perangkat framing yang ditawarkan Entman, diantaranya: pertama, pendefinisian masalah (*define problems*); kedua, memperkirakan masalah atau sumber masalah (*diagnose causes*); ketiga, membuat keputusan moral (*make moral judgement*); keempat, menekankan penyelesaian (*treatment recommendation*), maka melalui perangkat analisis framing inilah peneliti membedah framing berita Kompas tentang Angelina Sondakh.

Dari 62 judul berita korupsi yang berhubungan dengan Angelina Sondakh, maka peneliti menentukan empat judul berita yang menempatkan Angelina tidak hanya sebagai korban, tetapi juga pelaku atau aktor dari tindakan korupsi tersebut. Angie sebenarnya adalah korban dari sebuah konspirasi atau skenario besar korupsi yang ada di partainya, melalui penugasan dirinya di komisi X DPR dan di Badan Anggaran DPR. Keempat judul berita ini peneliti anggap representatif untuk dianalisis dengan menggunakan analisis framing Robert N. Entman. Berikut ini beberapa teks berita yang dipilih.

4.3.1 Teks Berita 1: Penggiringan Anggaran-Angelina Sondakh Menyesal Masuk Politik

Harian Umum Kompas menurunkan judul berita ini pada hari Sabtu, 15 Desember 2012. Berita dengan judul "Penggiringan Anggaran-Angelina Sondakh Menyesal Masuk Politik", ditepatkan di halaman 3, pada Rubrik Politik dan Hukum.

Pemberitaan ini mengaitkan pernyataan penyesalan Angelina Sondakh sebagai politisi perempuan, yang sudah terjebak dalam permainan politik yang dimainkan oleh politisi laki-laki, rekan separtainya yakni Nazaruddin. Namun isi berita yang disajikan tidak ada hubungannya dengan peristiwa yang diberitakan.

Tabel 4.3

Teks Berita 1 : Penggiringan Anggaran - Angelina Sondakh

Menyesal Masuk Politik

Define Problems (Pendefinisian masalah)	Angie bukan menyesali perbuatannya, tapi menyesal masuk ke dunia politik, menyesal mengenal Nazaruddin dan menyesal memperkenalkan Rosa kepada Haris
Diagnose Causes (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Angie adalah aktor penyebab yang menyebabkan terjadinya penggiringan anggaran proyek di Kemendiknas. Kasus ini terjadi akibat Angie buta dan tidak matang terhadap realitas dan permainan politik yang sebenarnya.
Make Moral Judgement (Membuat keputusan moral)	Tindakan Angie memperkenalkan Rosa kepada Haris atas perintah Nazaruddin tidak bisa dilepaskan karena posisinya sebagai salah satu pengurus di struktur DPP Partai Demokrat. Politik itu kotor dan tidak sesuai bagi Angie.
Treatment Recommendations (Menekankan Penyelesaian)	Angie seharusnya mau membuka isi percakapannya dengan Rosa dan Haris serta mengakui perannya dalam penggiringan proyek di Kemendiknas. Sebaiknya Angie keluar dari politik dan sebelum itu, ia harus berani mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya tentang siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut

Sumber: Kompas, Sabtu, 15 Desember 2012

4.3.2 Teks Berita 2 : Angelina Menangis Dituntut 12 Tahun karena Dinilai Giring Anggaran di Kemenpora

Harian Umum Kompas menurunkan judul berita ini pada hari Jum'at, 21 Desember 2012. Berita dengan judul "Angelina Menangis Dituntut 12 Tahun karena Dinilai Giring Anggaran di Kemenpora", ditempatkan di halaman 3, pada Rubrik Politik dan Hukum.

Kompas memberitakan pada awal edisi ini bahwa tangis terdakwa Angelina Sondakh atau Angie pecah se usai tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Angie dituntut pidana penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta subsidi kurungan enam bulan dan membayar uang pengganti Rp 12,58 miliar dan 2,35 juta dollar AS. Ditambahkan oleh penuntut umum Kresno Anto Wibowo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bahwa apabila tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka diganti pidana penjara selama dua tahun.

Tabel 4.4
Teks Berita 2: Angelina Menangis Dituntut 12 Tahun Karena Dinilai
Giring Anggaran di Kemenpora

Define Problems (Pendefinisian Masalah)	Angie menangis karena dituntut Jaksa 12 tahun penjara.
Diagnose Causes (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Selaku anggota Badan Anggaran DPR dan Koordinator Kelompok Kerja Komisi X DPR tahun 2010 Anggie dianggap terbukti melakukan penggiringan anggaran di Kemenpora dan Kemendiknas. Kelemahan dan ketidaktahuan Angie dalam politik anggaran di DPR, menyebabkan dirinya kemudian terjerat sebagai tersangka dan masuk dalam lingkaran korupsi di DPR.
Make Moral Judgement (Membuat Keputusan Moral)	Posisi Angie sebagai salah satu anggota Badan Anggaran dan anggota Komisi X DPR, menyebabkan dalam setiap keputusan dan tindakan yang dia ambil, tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa terlepas dari instruksi atau pengetahuan pimpinan partai, pimpinan fraksi, pimpinan komisi maupun pimpinan badan anggaran dimana dia berada, karena mekanisme keputusan di DPR adalah <i>collective collegial</i> atau berdasarkan keputusan bersama, sehingga dampak atas keputusan pengalokasian anggaran tersebut juga seharusnya diterima oleh anggota DPR lain yang terlibat dalam kebijakan tersebut.
Treatment Recommendations (Menekankan penyelesaian)	Melanjutkan persidangan berikutnya dengan agenda pembelaan dari Angie dan penasehat hukumnya.

Sumber: Kompas, 21 Desember 2012

4.3.3 Teks Berita 3 : Kasus Korupsi -Repotnya Sosialita Jika Jadi Terdakwa

Harian Umum Kompas menurunkan judul berita ini pada hari Minggu, 23 Desember 2012. Berita dengan judul “Kasus Korupsi –Repotnya Sosialita Jika Jadi Tersangka”, ditempatkan di halaman 3, pada Rubrik Umum. Berita yang disajikan lebih bersifat *soft news*.

Berita pada terbitan kali ini diawali dengan ungkapan bahwa dahulu penjara identik dengan “penebusan dosa” di dunia, sehingga makan dirasa tidak enak dan tidur pun tidak nyenyak, sebagai hal yang wajar terjadi di masa lalu. Kemudian Kompas beranjak pada gambaran kehidupann terdakwa kasus korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Salah satu yang diangkat dalam berita ini adalah Angelina Sondakh sebagai mantan pejabat Partai Demokrat yang karena kasusnya kemudian mundur dan dimundurkan dari partai.

Tabel 4.5
Teks Berita 3 : Kasus Korupsi -Reputnya Sosialita
Jika Jadi Terdakwa

Define Problems (Pendefinisian masalah)	Perilaku Angie selama persidangan kasus korupsi lebih menonjolkan sisi esensialnya sebagai perempuan untuk meraih simpati Majelis Hakim, media dan masyarakat
Diagnose Causes (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Perilaku Angie selama persidangan sebagai penyebab permasalahan. Penonjolan sikap-sikap femininnya sebagai seorang perempuan dan ibu, menjadi hal yang bagi Kompas menarik untuk diangkat sebagai berita, meskipun hal tersebut sebenarnya sangat bias gender. Apa yang salah dalam sikap feminin tersebut? Dan kenapa hal itu yang dijadikan penonjolan berita oleh Kompas terhadap kasus Angie?
Make Moral Judgement (Membuat keputusan moral)	Latar belakang dari lingkungan selebritis, mantan Puteri Indonesia, dan status dirinya sebagai seorang ibu dari tiga anak yang ditinggal wafat suaminya, dengan pembawaan diri yang sopan dan kemampuan komunikasi yang baik selama di persidangan sebagai magnet bagi media untuk menjadikan Angie sebagai sumber berita dari berbagai <i>angel</i> berita, meskipun kasus utamanya tentang korupsi. Sikapnya yang menangis di persidangan ketika mengingat anak-anaknya yang masih kecil, merupakan sikap yang wajar sebagai seorang ibu, karena khawatir bila mengingat kondisi anak-anaknya yang masih kecil dan harus tinggal berjauhan dalam waktu lama.
Treatment Recommendations (Menekankan penyelesaian)	Angie tidak selalu menonjolkan sikap-sikap femininnya dalam menjalani persidangan atau memanfaatkan publikasi media yang besar-besaran tentang kasus yang sedang ia alami untuk kepentingan dirinya sendiri.

Sumber: Kompas, 23 Desember 2012

4.3.4 Teks Berita 4 : Angie Merasa Lugu Vonis Akan Dijatuhkan Kamis 10 Januari 2013

Teks berita keempat yang dianalisis adalah tentang berita yang berjudul “Angie Merasa Lugu Vonis Akan Dijatuhkan Kamis, 10 Januari 2013”, yang dipublikasikan pada hari Jum’at, 4 Januari 2013, ditempatkan di halaman 4 pada Rubrik Politik dan Hukum. Berita ini menyajikan tentang tanggapan Angie terhadap dunia politik yang digelutinya selama ini, sehingga akhirnya ia terkena kasus korupsi dan menjalani persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi. Berita ini diturunkan satu minggu sebelum putusan hukum (vonis pengadilan) terhadap kasus korupsi yang dijalani Angelina Sondakh.

Penempatan judul berita seperti ini seolah menegaskan bahwa politik tidak cocok bagi Angie sebagai perempuan, karena keluguan perempuan membuatnya seolah mudah untuk dibohongi, tentu saja judul berita yang seperti ini sangat bias gender, dan tidak tepat untuk dilakukan oleh Kompas. Keluguan seseorang terhadap politik tidak bisa hanya

dilihat karena faktor jenis kelaminnya saja, baik sebagai perempuan maupun sebagai laki-laki.

Tabel 4.6
Teks Berita 4: Angie Merasa Lugu-Vonis Akan Dijatuhkan
Kamis 10 Januari 2013

Define Problems (Pendefinisian masalah)	Angelina Sondakh merasa polos dan lugu dalam menjalankan aktifitas sebagai politisi, sehingga dalam kasus korupsi yang sedang ia hadapi, tidak sadar diperdaya oleh orang yang bertopeng kebenaran yang sedang memainkan skenarionya. Dalam hal ini seolah menegaskan bahwa politik itu kotor dan tidak cocok bagi perempuan, karena perempuan dengan kelugunya terhadap politik, sebagai pihak yang kemudian mudah untuk dibohongi.
Diagnose Causes (Memperkiraan masalah atau sumber masalah)	Sumber masalah yang disajikan dalam berita ini adalah Mindo Rosalina (bawahan Nazaruddin di perusahaan) dan yang menjadi korban adalah Angie. Dalam politik, Angie diberitakan Kompas, sebagai pihak yang lugu dan tidak paham dengan persoalan politik di DPR.
Make Moral Judgement (Membuat keputusan moral)	Perempuan yang terlibat dalam sebuah kasus korupsi, seharusnya dilihat tidak hanya sebagai pelaku yang telah melanggar hukum, tetapi juga sebagai korban atas kepentingan yang lebih besar di atasnya, yang itu harus diungkap atas nama keadilan.
Treatment Recommendations (Menekankan penyelesaian)	Menyerahkan pada aparat penegak hukum, terutama KPK untuk menelusuri lebih jauh siapa yang menjadi dalang tindakan korupsi dalam kasus ini.

Sumber: Kompas, 04 Januari 2013

Dari keempat judul berita Kompas yang peneliti pilih untuk dianalisis, maka dapat diketahui bagaimana perempuan direpresentasikan oleh media dalam beraktifitas di dunia politik sampai pada terjadinya perilaku korupsi:

1. Politik itu kotor, keras, penuh intrik dan permainan yang sifatnya maskulin, dalam balutan budaya patriarki, sehingga tidak sesuai bagi perempuan yang cenderung menonjolkan sisi femininnya dalam beraktifitas di dunia maskulin tersebut.
2. Dalam konteks pemberantasan korupsi, perempuan dikonstruksi oleh media, sebagai penghambat upaya pengungkapan kasus korupsi, dengan penonjolan sikap-sikap feminin yang ditampilkannya selama di persidangan, misalnya emosional (mudah menangis), mengutamakan bersolek untuk menghadiri persidangan, dan tidak berani memosisikan diri sebagai *whistler blower*, pengungkap fakta/kebenaran terhadap kasus korupsi yang ia alami.

4.4 Temuan lain dalam Framing Berita Kompas tentang Kasus Korupsi Angelina Sondakh

Dalam penelitian ini, ditemukan beberapa fakta lain berdasarkan pemberitaan Kompas terkait kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR RI. Dalam berita Kompas, Jum'at, 12 Oktober 2012, halaman 4, mantan Direktur Pemasaran di Perusahaan Grup Permai, Mindo Rosalina Manulang, memberikan kesaksian yang mempertegas bahwa di semua Komisi DPR ada anggota Dewan yang menjadi bagian dari mafia anggaran. Tugas mereka adalah menggiring anggaran agar sesuai pesanan perusahaan-perusahaan yang ikut bermain, seperti hal yang sama yang dilakukan Rosa dengan perusahaannya Grup Permai yang memiliki hubungan dengan anggota DPR Komisi X, Angelina Sondakh.

Majelis Hakim yang diketuai Sudjatmiko juga mempertanyakan hal lain kepada Rosa untuk memperjelas istilah yang digunakan oleh Angie dalam berita acara pemeriksaan (BAP), bahwa yang dimaksud dengan sebutan "Ketua" tersebut adalah Ketua Komisi X, sedangkan "Ketua Besar" adalah Ketua Badan Anggaran DPR.

Dari kesaksian Rosa dipersidangan tersebut terlihat bahwa mafia anggaran sudah seperti virus dalam sistem di DPR, yang tidak mudah diberangus, karena perilaku korupsi yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh Angelina sebagai salah satu anggota DPR, tetapi justru dimulai dari Ketua Komisi X dan Ketua Badan Anggaran juga terlibat dengan adanya penggiringan alokasi dana proyek tertentu yang berada dalam kewenangan dan pengawasannya.

Sehingga bisa dikatakan bahwa korupsi di DPR sudah seperti jaringan mafia, dimana tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang berada pada struktur paling bawah, sudah pasti diketahui, didukung, dan mungkin sudah menjadi perintah langsung dari pimpinan yang ada di atasnya. Siapapun yang terlibat sudah saling sama-sama tahu dan bahkan saling menutupi untuk keselamatan bersama.

Dalam berita Kompas Kamis, 21 Juni 2012, halaman 4, diterangkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi sedang mengincar anggota Badan Anggaran DPR lain, I Wayan Koster yang sama-sama bertugas di Komisi X DPR terkait kasus dugaan korupsi yang sama dengan Angie, yaitu pembahasan anggaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terkait proyek 16 Perguruan Tinggi Negeri. Dalam berita yang sama, dijelaskan bahwa Anggaran Kemendikbud terkait proyek di 16 PTN tersebut mencapai Rp 600 miliar yang diduga menjadi bancakan para anggota DPR.

Dalam Berita Kompas, Kamis 14 Maret 2013, Halaman 1, pegiat Indonesian Corruption Watch, Abdullah Dahlan, menyarankan agar Komisi Pemberantasan Korupsi

mesti mengembangkan pendekatan baru. KPK diminta tak hanya menjerat pelaku korupsi, tetapi juga parpol sebagai korporasi yang menerima dana hasil korupsi. Dahlan menambahkan, agar Badan Anggaran DPR tidak perlu menjadi lembaga permanen. Saat ini, koalisi LSM sedang mengajukan uji materi UU DPR, DPD, dan DPRD ke Mahkamah Konstitusi terkait penghapusan Badan Anggaran DPR. Berikut ini peneliti sajikan daftar pengurus partai politik yang terjerat korupsi, sebagai gambaran bahwa korupsi sudah merata terjadi di hampir semua partai yang saat ini memiliki perwakilan kursi di DPR.

4.5 Pandangan Informan Terhadap Kasus Korupsi Angelina Sondakh

Peneliti mencoba menggali pandangan informan tentang kasus korupsi yang menjerat beberapa politisi perempuan, pada periode 2009-2014 yang menduduki kursi DPR RI, khususnya terhadap kasus korupsi Angelina Sondakh yang ditampilkan Kompas.

4.5.1 Pandangan Terhadap Pemberitaan Kompas Tentang Kasus Korupsi Angelina Sondakh

Sebagai wartawan senior Kompas, Maria Hartiningsih, memiliki perspektif terhadap isu-isu perempuan, karena ia memiliki *discourse* disebabkan latar belakang pendidikan (S2) yang pernah ia tempuh dalam bidang kajian wanita di UI. Bagi wartawan senior Kompas seperti Maria, ruang yang diberikan oleh Kompas memang ada, tapi tidak dalam kolom yang sengaja diberikan rutin untuk diisi pemikirannya setiap hari atau setiap minggu. Ia memperjuangkan pandangannya tentang isu-isu perempuan melalui kolom luar negeri, sedangkan melalui kolom dalam negeri, ia hanya diberi tempat pada kolom Humaniora, dan itu pun harus berebut dengan tulisan-tulisan yang lain. Di sisi lain, dalam pandangan Maria, wartawan Kompas lain, (selain dirinya, Ninuk Pambudy dan Agnes) tidak memiliki perspektif gender, maka pemberitaan yang ditulis mereka, lebih mengikuti pada aturan-aturan kaidah jurnalistik yang dipahami oleh subjektif wartawan tersebut.

Bahkan menurut Maria, saat ini meskipun tidak secara formal dihapus, tapi rubrik Swara yang awalnya memang sengaja dibuat untuk memberikan perspektif berbeda tentang isu-isu perempuan, saat ini sudah jarang diadakan, Maria sendiri tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya. Sehingga, yang disesalkan kemudian, pada saat ada persoalan-persoalan perempuan yang sedang terjadi di masyarakat, Maria misalnya hanya bisa menyelipkan tulisannya melalui kolom-kolom tertentu. Maria mengakui bahwa framing yang dibangun Kompas tentang politisi perempuan memang tidak seharusnya lebih mengangkat hal-hal yang sifatnya esensial dari diri Angie sebagai perempuan.

Maria sendiri menginginkan Kompas memiliki perspektif yang lebih sensitif gender dalam membicarakan tentang kasus korupsi yang dialami oleh politisi perempuan.

Namun satu hal yang sangat ironis, dalam pandangan Maria, Angie juga dilihat sebagai Aktor, sebagaimana pandangan Ani sebelumnya. Bahkan secara tegas dan berulang-ulang, Angie dilihat sebagai *drama queen* oleh Maria, karena dalam proses persidangan yang ia jalani, Angie lebih banyak menangis, dan pintar membentuk citranya sebagai perempuan baik dan berpendidikan, bahkan memposisikan dirinya sebagai korban dalam kasus korupsi di partainya.

Dalam pandangan peneliti, dari kedua pendapat informan di atas, terjadi hal yang tidak konsisten melihat pemberitaan Angie, jika sistem partai politik, termasuk di DPR masih berlaku sebagaimana aturan main yang dibuat oleh laki-laki, maka siapapun yang masuk dalam sistem tersebut akan mudah terjerumus sebagai korban, baik perempuan maupun laki-laki. Bukan justru dilihat sebagai pelaku atau aktor.

Pemberitaan media menambah lagi penderitaan politisi perempuan tersebut sebagai korban. Ibarat pepatah, “sudah jatuh tertimpa tangga”, begitulah nasib kaum perempuan yang menjadi politisi di DPR, terutama bagi mereka yang berani bertindak dan mengambil posisi sebagai pengambil kebijakan, sehingga jika kebijakan yang diambil (yang sebenarnya merupakan keputusan partai dimana ia berasal), kemudian justru berdampak pada kasus hukum, maka perempuan tersebut pun otomatis akan terkena tindakan hukum, karena dianggap melakukan perbuatan pidana, meskipun keputusan yang ia ambil, demi untuk kepentingan partai, tapi jika sudah menjadi tersangka, bahkan terdakwa, posisi di partai hilang, posisi di DPR juga hilang dan harus menghadapi proses hukum yang berlaku.

Ditambah lagi dengan pemberitaan media yang sering bias gender. Kasus korupsi yang dialami oleh politisi perempuan, diberitakan lebih menarik, dengan mengangkat sisi-sisi feminin yang melekat pada diri perempuan tersebut, jika politisi perempuan tersebut berasal dari lingkungan selebritis (sebelum terjun ke politik), semakin banyak lagi topik berita yang bisa diangkat dari sosoknya, seperti kasus yang dialami oleh Angelina Sondakh.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Jika dilihat dari judul dan isi berita Kompas tentang Angelina Sondakh, ditemukan beberapa kesimpulan:

1. Pada empat judul dan isi berita ditemukan tidak substantif membahas tentang kasus korupsi yang dialami, namun membias pada hal-hal yang bersifat keperempuanan pada diri Angelina Sondakh. Berita yang ditampilkan lebih menekankan pada “embel-embel” yang sebelumnya melekat pada diri Angelina Sondakh sebagai pemenang salah satu kontes kecantikan di Indonesia dengan slogan yang disandangnya: *brain, beauty, behavior, dan blessed*.
2. Mengangkat tentang latar belakang pendidikan Master Komunikasi yang dianggap mempengaruhi kualitas kemampuan Angie dalam berkomunikasi,
3. Dari keempat judul dan isi berita di atas, ditemukan fakta bahwa Kompas sebagai Harian Umum yang mengakui masih menjaga netralitasnya dalam menampilkan berita ternyata masih menerapkan framing berita yang di luar substansi persoalan korupsi yang dialami Angelina Sondakh selama persidangan berlangsung. Sisi humanisme yang diangkat tentang sifat feminin yang ditampilkan Angie, atau esensialis menurut bahasa Kompas, dalam pandangan peneliti, ditampilkan Kompas lebih untuk membuat daya tarik berita agar “lebih menarik” diantara tampilan berita lain terkait perjalanan pengadilan korupsi kasus Angie yang lebih bernuansa hukum formal.

5.2 Saran

5.2.1 Saran akademis

Penelitian ini merupakan penelitian terhadap framing media menggunakan paradigma kritis dengan menerapkan pemikiran teori feminisme radikal. Berdasarkan kekurangan dalam penelitian ini, maka peneliti menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan tentang bagaimana sebenarnya proses framing berita yang terjadi di Harian Umum Kompas, bagaimana proses framing berita tersebut terbentuk dalam paradigma jurnalis Kompas yang menulis berita tentang korupsi politisi perempuan tersebut.

Selain itu, peneliti juga merekomendasikan perlunya dilakukan analisis terhadap khalayak untuk mengetahui bagaimana pembaca Harian Umum Kompas memandang *frame* Kompas terhadap kasus korupsi yang menjerat politisi perempuan.

5.2.2 Saran Praktis

Kompas seharusnya tidak melakukan framing berita yang bias gender, dan akhirnya mendiskreditkan perempuan (dalam hal ini Angelina Sondakh) dengan mengeksploitasi sifat feminin yang disandangnya, dalam kapasitas personalnya sebagai perempuan.

Kompas juga seharusnya memberikan ruang bagi politisi perempuan lain yang tidak terlibat korupsi untuk memberikan tanggapan menyikapi kasus korupsi sesama rekannya di DPR, bahwa tidak semua anggota DPR korupsi dan hanya sebagian kecil anggota DPR perempuan yang terlibat korupsi, masih banyak politisi perempuan lain di DPR yang bersih.

Kompas juga seharusnya melakukan keseimbangan berita dengan menampilkan framing tentang politisi perempuan lain yang sudah menorehkan banyak prestasi sesuai dengan bidang kerja mereka di berbagai Komisi DPR RI.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Alison, J. & Paula S.R. (2004). *Feminist frameworks 3rd edition: Alternative theoretical accounts of the relations between women and men*. New York: McGraw Hill.
- Arivia, Gadis, (2003). *Filsafat berperspektif feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Denzin, N.K. & Yvonna S.L. (2000). *Handbook of qualitative research (2nded.)*. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publications.
- Dhakidae (ed.). (1994). *Perempuan, politik dan jurnalisme: 70 tahun Toety Aziz*. Jakarta: Yayasan Padi dan Kapas.
- Eriyanto.(2002). *Analisis framing konstruksi, ideologi, dan politik media*. LKiS: Yogyakarta.
- Fakih, M. (2001). *Analisis gender dan transformasi sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Golding, P. & Philip E. (1999). Making the news. Howard T. (ed.). *News: A reader*. Oxford: University Press.
- Habermas, J. (1989). *Theory of communicative action.vol. 2.lifeworld and system: a critique of functionalist reason*. Boston: Beacon Press.
- Hamad, I. (2010). *Komunikasi sebagai wacana*. Latofi Enterprise: Jakarta
- Horkheimer, M.(1993). *Between philosophy and social sciences*. Cambridge: MIT Press.
- Humm, M. (ed.). (1989). *The dictionary of feminist theory (2nd ed.)*. Ohio State University Press: Columbus.
- Keller, A. (2009). *Tantangan dari dalam-Otonomi redaksi di 4 media cetak nasional kompas, koran tempo, media indonesia, republik*. Friedrich Ebert Stiftung: Jakarta.
- Littlejohn, S.W & Karen A.F. (2005). *Theories of human communication*. (8thed.). New York: Wadsworth.
- McQuails, D. (2000). *Mass communication theory (4thed.)*. Sage Publication: London.
- Mosco, V. (1996). *The political economy of communication-Rethinking and renewal*. Sage Publication: London.
- Mulyana, D. (2002). *Metode penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Murdock, G. & Peter G. (1995). For a political economy of mass communication. Dalam Oliver Boyd-Barret & Chris Newbold (ed.) *Approaches to media: A reader*. Arnold Publication: London.
- Newbold, C. (1995). Feminist studies of the media. Dalam Oliver Boyd-Barret & Chris Newbold. *Approaches media: A reader*. Arnold: London.

- Pace, R. W. & Don F.F. (1994). *Organizational communication*. (3rd ed.). Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall.
- Entman, R.M. & Andrew R. (1993). Freezing out the public: Elite and media framing of the U.S. anti nuclear movement. *Political communication*. vol.1.No.1.
- Shoemaker, P.J. & James W.T. & Dominic L.L. (2004). *How to build social science theories*. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publications, Inc.
- Soetjipto, A. & Sri B.E.W., dkk.(2010). *Menyapu dapur kotor-Refleksi perempuan dan politik era reformasi*. Jakarta: Puskapol FISIP UI.
- Tong, R.P. (2010). *Feminist thought-Pengantar paling komprehensif kepada arus utama pemikiran feminis*. Jalasutra: Yogyakarta.
- Tuchman, G. (1978). *Making news: A study in the construction of reality*. New York: The Free Press.
- Zoonen, van L. (1994). *Feminist media studies*. London: Sage Publication.

II. SERIAL

Artikel Jurnal:

- Amiruddin, M. (2000). Pejabat perempuan dalam situasi sosial politik Indonesia: Antara identitas gender dan integritas kepemimpinan”. *Jurnal Perempuan*. Vol, 17 No. 4.
- Hamad, I. (2004). Media massa dan konstruksi realitas politik. *Jurnal Penelitian Ilmu Komunikasi Thesis*. Vol III/No.1.
- Hidayat, D.N. (2005). Teori dan penelitian dalam teori-teori kritis. *Jurnal Penelitian Ilmu Komunikasi Thesis*. Vol IV/No. 2.

Artikel Surat Kabar:

- Soetjipto, Ani.(2012, Oktober 22). Perempuan dan Korupsi.Kompas, 6.
- Luhulima, James. (2012, Februari 18).Keterangan di bawah sumpah.Kompas, 15.